

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester II 2024 (31 Desember 2024)

JL. DIPONEGORO - MAUMERE
SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615
Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514
e-mail : pa.maumere@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Untuk Periode 2024 (*Audited*)

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.manmere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacupada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ix
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi.....	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	50
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	50
B.2. Belanja	51
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	51
C.1. Aset Lancar	51
C.2. Aset Tetap.....	52
C.3. Aset Lainnya	54
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	55
C.6. Ekuitas	57
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	57
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	57
D.2. Beban Pegawai	58

D.3.	Beban Persediaan.....	58
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	59
D.5.	Beban Pemeliharaan	59
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	60
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	60
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	60
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	61
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	61
D.11.	Beban Lain-lain.....	62
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	62
D.13.	Pos Luar Biasa.....	63
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	63
E.1.	Ekuitas Awal.....	63
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	63
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	63
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	63
E.3.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	64
E.3.4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	64
E.3.5	Koreksi Lain-lain.....	64
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	64
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	65
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	65
E.5.	Ekuitas Akhir	65
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	65
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	65
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	65
	Daftar dan Lampiran	67
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	68
	Daftar Hibah Langsung.....	71

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

RINGKASAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per Semester II (31 Desember 2024) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRI ENDO, S.H.I.

NIP.19710421 199603 1 002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,713,286 atau mencapai 83 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp2,055,000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,668,521,669 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp2,709,273,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per Semester II (31 Desember 2024).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp9,458,597,106 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp9,458,597,106; Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; & Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp1,027,860 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1,027,860 & Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp9,457,569,246.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,713,286 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2,913,422,327 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2,911,709,041) Kegiatan Nonoperasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp0 dan surplus (defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar (Rp2,911,709,041).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9,674,989,904 ditambah surplus (defisit)-LO sebesar (Rp2,911,709,041) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2,694,288,383, & ditambah Kenaikan (Penurunan) Ekuitas sebesar Rp(217,420,658) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9,457,569,246.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2,055,000	1,713,286	83	1,837,836	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2,055,000	1,713,286	83	1,837,836	
B. Belanja Negara	B.2					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	1,601,758,000	1,562,795,182	98	1,553,986,649	
2. Belanja Barang	B.2.2.	1,107,515,000	1,105,726,487	99	1,139,699,488	
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0	
Jumlah Belanja Negara		2,709,273,000	2,668,521,669	99	2,697,174,000	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NERACA

Per 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Plutang Bukan Pajak	C.1. 2.	0	0
Plutang Bukan Pajak (Netto)	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	4,045,410,000	4,045,410,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,979,528,443	2,952,048,443
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,229,115,000	6,229,115,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	25,401,979	25,401,979
Konstruksi dalam Penggerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,820,858,316)	(3,561,456,544)
Jumlah Aset Tetap		9,458,597,106	9,690,518,878
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4,510,000	4,510,000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	262,389,250	262,389,250
Aset Lainnya yang Belum DIREGISTER	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(266,899,250)	(266,899,250)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		9,458,597,106	9,690,518,878
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	1,027,860	15,528,974
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,027,860	15,528,974
Jumlah Kewajiban		1,027,860	15,528,974
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	9,457,569,246	9,674,989,904
Jumlah Ekuitas Dana		9,457,569,246	9,674,989,904
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		9,458,597,106	9,690,518,878

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL**

Per 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1,713,286	1,837,836
Jumlah Pendapatan		1,713,286	1,837,836
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1,548,304,200	1,568,477,623
Beban Persediaan	D. 3	28,265,800	32,623,200
Beban Barang dan Jasa	D. 4	515,765,347	554,657,488
Beban Pemeliharaan	D. 5	414,711,200	390,468,800
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	146,974,000	161,950,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	259,401,772	284,664,269
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2,913,422,327	2,992,841,380
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2,911,709,041)	(2,991,003,544)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2,911,709,041)	(2,991,003,544)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Pendapatan PNBP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2,911,709,041)	(2,991,003,544)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang menjelaskan bagian yang tidak terpantau di Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E. 1	9,674,989,904	9,945,838,897
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2,911,709,041)	(2,991,003,544)
Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Rerevaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2,694,288,383	2,720,154,551
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(217,420,658)	(270,848,993)
Ekuitas Akhir		9,457,569,246	9,674,989,904

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang menjelaskan bagian yang tidak terpantulkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Maumere

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

3. Meningkatkan mutu pelayanan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan administrasi persuratan, kearsipan dan keprotokolan, humas dan keamanan.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

[1.] Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, & Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a)Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Urutan	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- * Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- * Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- * Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- * Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- * Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- * Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- * Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Nilai Manfaat (Rupiah)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Bahasa Dapang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Pengelaran, Paten Bissa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terpasar, Perlindungan Varietas Tanaman Tahanan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Program.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- * Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- * Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- * Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- * Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.1.713.286

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.713.286 atau mencapai 83 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.055.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Urutan	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekut/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,055,000	1,713,286	83
	Total Pendapatan	2,055,000	1,713,286	83

Adanya pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.713.286 dikarenakan gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere kini difungsikan sebagai mess pegawai, sehingga terhitung mulai Juni 2017 terdapat PNBP dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.713.286 atau mencapai 83 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.055.000. Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Pengubahan	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,713,286	1,837,836	(124,550)	(7)
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekut/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0
	Total Pendapatan	1,713,286	1,837,836	(124,550)	(7)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp
2,668,521,669

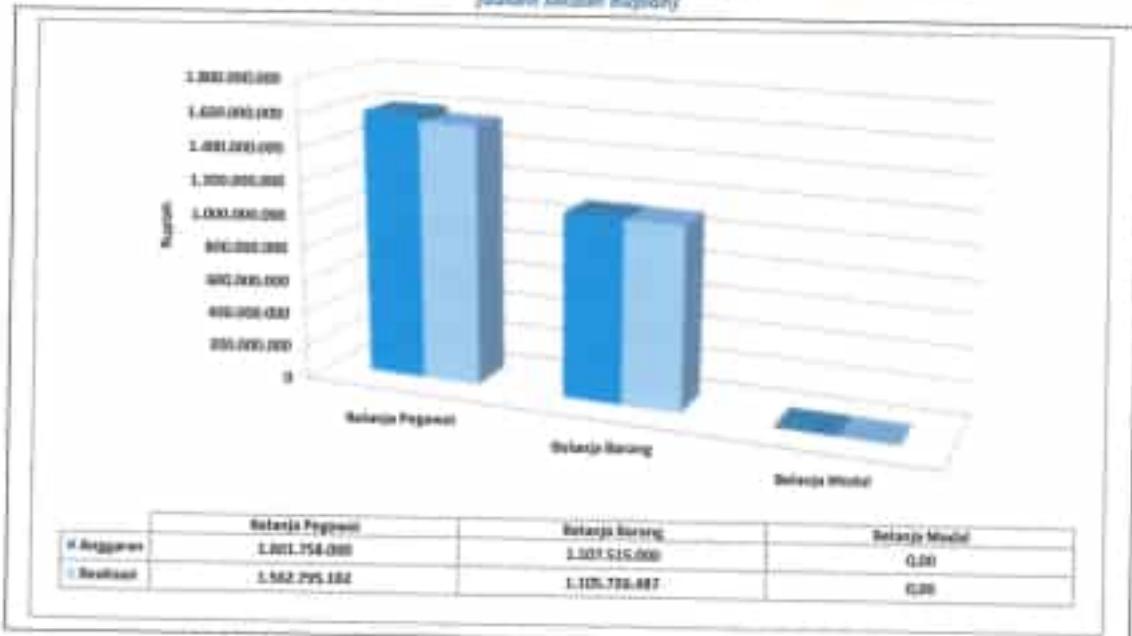
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2,668,521,669 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99% dari anggaran senilai Rp. 2,709,273,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
(Jumlah satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,601,758,000	1,562,795,182	98
Belanja Barang	1,107,515,000	1,105,726,487	99
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	2,709,273,000	2,668,521,669	99
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	2,709,273,000	2,668,521,669	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
(Jumlah satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistemi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (LAKBA) 2024 A.2023

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,668,521,669 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99% dari anggaran senilai Rp2,709,273,000. Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Raih (Rupiah)	%
Belanja Pegawai	1,562,795,182	1,553,986,649	8,808,533	0,57
Belanja Barang	1,105,726,487	1,139,699,488	(33,973,001)	(2,98)
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	2,668,521,669	2,693,686,137	(25,164,468)	(0,93)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai :
Rp1,562,795,182

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1,562,795,182 & Rp1,105,726,487. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Raih (Rupiah)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	583,653,500	614,267,300	(30,613,800)	(4,98)
Belanja Pembuatan Gaji PNS	5,046	11,309	(2,263)	(20)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	40,709,900	41,851,854	(1,141,954)	(2,73)
Belanja Tunj. Anak PNS	10,779,242	10,233,184	546,058	5,34
Belanja Tunj. Struktural PNS	21,280,000	17,850,000	3,430,000	19,21
Belanja Tunj. Fungsional PNS	651,455,000	598,400,000	52,055,000	8,68
Belanja Tunj. PPN PNS	96,261,736	77,465,450	18,796,286	11,25
Belanja Tunj. Beras PNS	29,692,200	32,154,480	(2,462,280)	(7,66)
Belanja Uang Makan PNS	85,425,000	101,911,000	(16,486,000)	(16,18)
Belanja Tunjangan Umum PNS	5,115,000	10,290,000	(5,175,000)	(50,29)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	48,600,000	48,802,500	(202,500)	(0,41)
Total Belanja Brutto	1,552,960,834	1,554,237,137	8,745,403	0,55
Pengembalian Belanja	185,442	250,488	(65,046)	(25,37)
Total Belanja Netto	1,562,795,182	1,553,986,649	8,808,533	0,57

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang :
Rp1,105,726,487

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1,105,726,487 & Rp1,139,699,488.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 2,98 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Barang Operasional
2. Penurunan Belanja Jasa
3. Penurunan Belanja Pemeliharaan

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024		Perubahan (Naik/Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	532,086,387	554,171,488	(22,084,501)	(3,98)
Belanja Barang Non Operasional	0	5,556,000	(5,556,000)	(100)
Belanja Jasa	28,069,000	38,170,000	(10,101,000)	(26,46)
Belanja Pemeliharaan	69,905,000	117,497,000	(47,592,000)	(40,5)
Belanja Perjalanan Dinas	388,596,500	379,852,000	18,744,500	4,93
Total Belanja Brutto	1,105,726,487	1,139,699,488	(34,973,001)	(2,98)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1,105,726,487	1,139,699,488	(34,973,001)	(2,98)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024		Perubahan	
	2024	2023	Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp0

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Plutang Bukan Pajak	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola & dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No	Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Bantah	0	0

C.1.2. Plutang Bukan Pajak

Plutang Bukan
Pajak: Rp0

Plutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Plutang Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	2024	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Plutang Bukan Pajak		0	0
Jumlah		0	0

C.2. Aset TetapAset Tetap : Rp
9,690,518,878

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp 9,690,518,878 dan Rp. 9,690,518,878. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Perselisihan (Debit/Credit)
1	Tanah	4,045,410,000	4,045,410,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,979,528,443	2,952,048,443	27,480,000
3	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979	0
	Jumlah	9,458,037,106	9,690,518,878	-27,480,000
	Akumulasi Penyusutan	(1,820,858,818)	(1,561,414,544)	(259,443,772)
	Jumlah Aset Tetap	9,458,037,106	9,690,518,878	(259,443,772)

C.2.1. TanahTanah: Rp
4,045,410,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4,045,410,000 dan Rp4,045,410,000. Jadi nilai aset tanah per 31 Desember 2024 adalah Rp4,045,410,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	KID	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Pemilik	Jumlah
1	1	272	Hak Pakai Nomor 600	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	250,876,000	
2	3	750	Hak Pakai Nomor 310	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	691,754,000	
3	4	3,840	Hak Pakai Nomor 18	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	3,102,718,000	
				Jumlah	4,045,410,000	

C.2.2. Peralatan dan MesinPeralatan dan
Mesin : Rp

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31

2,979,528,443 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2,979,528,443 & Rp2,952,048,443.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Peralatan dan Mesin	2,979,528,443	2,952,048,443
	Jumlah	2,979,528,443	2,952,048,443

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2,979,528,443 & Rp2,952,048,443. Terdapat mutasi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin berupa transfer masuk Scanner (Peralatan Personnal Komputer) dari BUA MA-RI dengan nilai aset Rp27,800,000. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan :
Rp6,229,115,000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6,229,115,000 & Rp6,229,115,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000
	Jumlah	6,229,115,000	6,229,115,000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp
25,401,979

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 25,401,979 dan Rp. 25,401,979.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979
	Jumlah	25,401,979	25,401,979

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan

Keuangan ini.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap : Rp
(3,820,858,316)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(3,820,858,316) dan Rp(3,561,456,544).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggeraan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,979,528,443	(2,763,801,238)	225,727,205
2	Gedung dan Bangunan	6,229,115,800	(1,057,057,078)	5,172,057,922
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(0)	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	(0)	25,401,979
	Jumlah	9,234,045,422	(3,820,858,316)	5,413,187,106

Aset Lainnya:
Rp 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Aset tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
2	Aset Lain-lain	262,388,250	262,388,250
3	Aset Lainnya yang belum diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	266,898,250	266,898,250
	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(266,898,250)	(266,898,250)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :
Rp 4,510,000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-

masing adalah sebesar Rp4,510,000 dan Rp4,510,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian Aset tak berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Aset Tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
	Jumlah	4,510,000	4,510,000

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4,510,000 dan Rp4,510,000. Asset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4,510,000 dan Rp4,510,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun 2024.

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 262,389,250

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp262,389,250 dan Rp262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2023	262,389,250
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2024	262,389,250

Saldo asset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 262,389,250 dan Rp. 262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek :
Rp1,027,860

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-

masing adalah sebesar Rp1,027,860 & Rp15,528,974. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Kategori	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang kepada Pihak Ketiga	1,027,860	15,528,974
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0	0
3	Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah		1,027,860	15,528,974

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp1,027,860

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1,027,860 & Rp15,528,974. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Pengadilan Agama Maumere per tanggal 31 Desember 2024 pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Utang kepada Pihak Ketiga	1,027,860	15,528,974
	Jumlah	1,027,860	15,528,974

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum
Ditagihkan:
Rp0

Jumlah utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Adapun rincian utang yang belum ditagihkan Pengadilan Agama Maumere per tanggal 31 Desember 2024 pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Utang yang Belum Ditagihkan	0	0
	Jumlah	0	0

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing

adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jumlah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.5. Ekuitas

Cabangan Pluiting:
Rp9,457,569,246

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,457,569,246 & Rp 9,674,989,904. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2024 terdapat penurunan nilai Kewajiban & Ekuitas sebesar (Rp231,921,772) atau sebesar (2.39) persen dari nilai per TA 2024. Jumlah nilai Kewajiban & Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9,458,597,106 sedangkan per TA 2023 tercatat sebesar Rp9,690,518,878.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP :
Rp1,713,286

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1,713,286 & Rp1,837,836. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

No.	Keterangan	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gertung, dan Bangunan	2,055,000	1,713,286	83,37
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekutuan/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		2,055,000	1,713,286	83,37

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,548,304,208 & Rp1,568,477,623. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), & pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	583,853,500	614,267,368	(30,613,868)	(4.98)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,072	12,283	(4,211)	(34.28)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40,700,900	41,851,854	(1,141,954)	(2.78)
Beban Tunj. Anak PNS	10,778,242	10,233,186	546,056	5.34
Beban Tunj. Struktural PNS	21,280,000	17,850,000	3,430,000	19.21
Beban Tunj. Fungsional PNS	638,855,000	612,000,000	26,855,000	4.39
Beban Tunj. PPH PNS	84,371,736	79,355,450	5,016,286	6.32
Beban Tunj. Beras PNS	29,692,200	32,154,480	(2,462,280)	(7.66)
Beban Uang Makan PNS	85,425,000	101,911,000	(16,486,000)	(16.18)
Beban Tunjangan Umum PNS	5,115,000	10,290,000	(5,175,000)	(50.29)
Beban Tunjangan Kemahtaman Hakim	48,600,000	48,802,500	(202,500)	(0.41)
Total Beban Bruto	1,548,489,850	1,568,477,623	(20,000,463)	(1.29)
Pengembalian Bahan	103,442	250,486	(147,044)	(58.97)
Total Beban Netto	1,548,304,208	1,568,477,623	(20,173,415)	(1.29)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28,265,800 & Rp17,693,700. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	28,265,800	32,623,200	(4,357,400)	(13.36)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan	0	0	0	0

Leges

Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	28.283.800	37.673.200	(4.397.400)	(13.386)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
Jasa :
Rp515.765.347

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp515.765.347 & Rp554.657.488. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	432.303.887	432.878.388	222.999	0,05
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	692.500	956.500	(264.000)	(27,6)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.432.000	71.916.000	(23.484.000)	(32,65)
Beban Operasional Lainnya	8.288.000	5.988.000	300.000	5,08
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	5.556.000	(5.556.000)	(100)
Beban Sewa	15.737.000	25.637.000	(9.900.000)	(38,42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12.321.860	12.533.000	(211.140)	(1,68)
Total Beban Barang dan Jasa	515.765.347	554.657.488	(38.892.141)	(7,01)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp414.711.200

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp414.711.200 & Rp390.468.800. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	174.180.500	166.300.000	7.880.500	4,74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.586.000	107.722.000	10.864.000	10,08
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	105.830.000	105.830.000	0	0

Beban Perolehan Bahan Untuk Pemeliharaan	16,134,700	10,615,800	5,497,900	\$1.79
Total Beban Pemeliharaan	144,711,200	90,468,800	34,243,400	\$1.21

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas :
Rp146,974,000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp146,974,000 & Rp161,950,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	146,974,000	161,950,000	(14,976,000)	-8.35
Total Beban Perjalanan Dinas	146,974,000	161,950,000	(14,976,000)	-8.35

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat :
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 &

31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial & bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai (Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi :
Rp259,401,772

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp259,401,772 & Rp284,664,269. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100,393,618	133,656,315	(25,262,497)	(18,80)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	151,008,154	151,008,154	0	0
Jumlah Penyusutan	251,401,772	284,664,269	(25,262,497)	(8,87)
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0
Beban Penyurutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	259,401,772	284,664,269	(25,262,497)	(8,87)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nahk (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain :
Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nahk (Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional :
Rp0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin & bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nahk (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0

Lancar

Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar BiasaRincian Pos Luar
Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nom (Tahun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,674,989,904 & Rp9,945,838,897.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(2,911,709,041) & Rp(2,991,003,544). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 & Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 (dalam satuan Rupiah)		
	Urutan	Koreksi
Barang Konsumsi		0
Suku Cadang		0
Barang Persediaan Lainnya		0
Total Koreksi Nilai Persediaan		0

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0.

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi

- Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang & utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2024 (dalam satuan Rupiah)		
	Urutan	Koreksi
Koreksi beban		0
Koreksi Pendapatan		0
Koreksi Piutang		0
Koreksi Kewajiban		0
Koreksi Hibah		0
Jumlah		0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,694,288,383 & Rp2,720,154,551.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BIJN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember 2024 <i>(dalam satuan Rupiah)</i>	
Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1,713,286)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,668,521,669
Transfer Masuk	27,480,000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	2,654,290,383

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(1,713,286) sedangkan DKEL sebesar Rp2,668,521,669.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas. Pada Periode hingga 31 Desember 2024, Transfer Masuk sebesar Rp27,480,000 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,457,569,246 & Rp9,674,989,904.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Maumere adalah

1. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 653244028511000 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan S-762/PB.3/2021 tanggal 21/04/2021
2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 9893004028521000 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-1632/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 19/06/2020
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. S-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015.

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Angaran : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Pembuat Komitmen : Abdullah, S.H., M.H.

Pejabat Penandatanganan/penguji SPM : Abdullah Muhammad, S.M.

Bendahara : Hamzah Usman

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Maumere
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
				Tarif Aset	Rabat Penyusutan	Total	
A.	Total	4,842	4,045,410,000	0	0	0	4,045,410,000
1.	Tanah Persil	4,842	4,045,410,000	0	0	0	4,045,410,000
B.	Fasilitas dan Mesin	216	2,573,320,000	(2,815,407,430)	(186,391,810)	(2,901,801,230)	215,323,209
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	390,018,628	(390,018,628)	0	(390,018,628)	0
2.	Alat Kantor	79	283,789,000	(283,789,000)	0	(283,789,000)	0
3.	Alat Rumah Tangga	194	1,141,321,796	(1,110,597,662)	(8,778,324)	(1,119,375,986)	21,945,810
4.	Alat Studie	9	67,817,820	(29,226,346)	(11,748,864)	(40,976,810)	26,840,810
5.	Alat Komunikasi	2	12,129,700	(12,129,700)	0	(12,129,700)	0
6.	Peralatan Pemancar	4	133,199,999	(85,899,999)	(15,000,000)	(100,899,999)	52,500,000
7.	Komputer Unit	31	686,335,910	(543,918,345)	(61,967,830)	(605,884,175)	80,451,735
8.	Peralatan Komputer	23	244,915,390	(200,828,140)	(10,887,500)	(210,916,640)	33,088,750
C.	Gedung dan Bangunan	6	6,228,315,000	(106,048,824)	(153,908,154)	(1857,857,078)	6,127,057,822
1.	Rangunan Gedung Tempat Kerja	8	3,006,257,000	(737,714,064)	(122,952,344)	(860,668,408)	4,145,590,588
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	785,779,000	(110,933,344)	(18,468,824)	(129,421,768)	656,353,232
3.	Tugu/Tanda Batas	2	437,083,000	(57,403,918)	(9,568,286)	(66,968,902)	370,114,098
D.	Aset Tetap Lainnya	465	25,403,879	0	0	0	25,403,879
1.	Barang Perpustakaan Tercetak	463	25,201,879	0	0	0	25,201,879
2.	Kartografi, Naskah dan Lukisan	2	200,000	0	0	0	200,000
E.	Aset Tetap yang Tidak Diperlukan dalam Operasi Pemerintahan	144	262,300,250	(262,300,250)	0	(262,300,250)	262,300,250
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	5,118,000	(5,118,000)	0	(5,118,000)	0
2.	Alat Kantor	35	29,723,000	(29,723,000)	0	(29,723,000)	0

3.	Alat Rumah Tangga	71	56,347,250	(56,347,250)	0	(56,347,250)	0
4.	Alat Studio	7	20,800,000	(20,800,000)	0	(20,800,000)	0
5.	Alat Komunikasi	11	21,367,000	(21,367,000)	0	(21,367,000)	0
6.	Peralatan Financiar	2	4,875,000	(4,875,000)	0	(4,875,000)	0
7.	Komputer Unit	9	71,700,000	(71,700,000)	0	(71,700,000)	0
8.	Peralatan Komputer	12	52,009,000	(52,009,000)	0	(52,009,000)	0
9.	Peralatan Olah Raga	1	450,000	(450,000)	0	(450,000)	0
	Jumlah	5,943	13,541,884,872	(13,541,884,872)	(156,461,977)	(156,461,977)	8,834,387,166

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama Maumere
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No.	Nama Pemohon Hibah	Kontak Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Salah Disahkan		Belum Disahkan
					Salah	Disahkan	
			Jumlah				